

## **BAB III**

### **KONDISI PENDIDIKAN PEREMPUAN DI PAKISTAN**

#### **I. Kondisi Umum Perempuan di Pakistan**

Pakistan merupakan negara republik islam yang menganut sistem budaya patriarki dimana posisi laki-laki adalah sebagai makhluk nomor satu dan posisi perempuan sebagai makhluk nomor dua atau dibawah laki-laki. Hal ini tentu saja memberi dampak yang serius terhadap status kehidupan kaum perempuan dan laki-laki di Pakistan. Banyak sektor-sektor di Pakistan yang diduduki oleh kaum laki-laki baik sebagai pengusaha atau sebagai pejabat pemerintah, hal ini dikarenakan kaum laki-laki memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat, seperti halnya diwajibkan bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan kaum perempuan hanya boleh di rumah dan mengabdikan diri pada suami dan anak-anak mereka.

Ketimpangan gender yang dirasakan oleh kaum perempuan di Pakistan sudah dimulai bahkan sebelum mereka dilahirkan, karena kelahiran anak perempuan bukanlah sesuatu yang diharapkan. Hidup kaum perempuan di Pakistan adalah pengabdian sebagai kaum dibawah kaum laki-laki. Seorang ayah memiliki hak untuk memutuskan hal-hal yang akan dijalani oleh anak perempuannya mulai dari apakah dia akan mendapatkan pendidikan atau tidak, hingga ke hal-hal yang sangat penting

seperti dengan siapa anak perempuannya akan menikah. Setelah menikah, suami dan mertua lah yang mengambil kendali hidup seorang perempuan seperti apakah dia harus melahirkan anak setiap tahun atau hanya boleh melahirkan anak laki-laki, dan apakah dia boleh bekerja atau hanya mengabdikan diri pada suami dan anak. Ketika seorang perempuan sudah semakin tua dan suaminya telah meninggal, anak laki-lakinya yang menentukan nasibnya di usia senja. Dan seperti tidak pernah cukup, seluruh masyarakatpun bertindak seperti seorang penindas, menggertak kaum perempuan agar selalu patuh pada kaum laki-laki.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Pakistan yang didominasi oleh laki-laki, tradisi dan budaya memberikan hak dan kekuatan kepada kaum laki-laki untuk membuat keputusan terhadap semua hal tentang kehidupan perempuan, laki-laki tersebut biasanya adalah ayahnya, paman, saudara, atau suaminya. Perempuan tidak memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri dalam urusan pribadinya. Kasus paling tinggi yang dihadapi perempuan setelah menikah adalah hak atau wewenang untuk menentukan pilihan jatuh di tangan suami mereka. Perempuan dipaksa untuk mematuhi perintah dari orang tua dan suami dalam setiap bidang kehidupan. Mereka tidak punya hak untuk memutuskan dan membuat pilihan untuk memulai karirnya secara bebas. Perempuan harus menerima profesi yang diinginkan oleh ayahnya. Karena kehidupan bermasyarakat di Pakistan merupakan dominasi dari kaum laki-laki, oleh sebab itu laki-laki mengadopsi sikap yang sangat koersif dan otoriter, pendekatan terhadap istri-istri mereka hanya untuk membuktikan bahwa laki-laki lebih unggul dalam sebuah sistem keluarga.

Pada Juni 2003, Majelis Daerah Pakistan memperkenalkan sebuah undang-undang hukum syariah di wilayah yang berbatasan dengan Afghanistan. Hukum tersebut mendeklarasikan bahwa hukum syariah menjadi hukum yang paling tinggi. Pada April 2009, Presiden Pakistan Zardari menandatangani pengenalan undang-undang Hukum Islam Syariah kepada Lembah Swat yang dikuasai oleh Taliban. Hukum Syariah melarang perempuan untuk meninggalkan rumah tanpa izin dari suami atau ayahnya. Selain itu, hukum Syariah juga membiarkan hukum main hakim sendiri terhadap perempuan seperti yang paling marak adalah *honour killing* (pembunuhan kehormatan), multilasi dan pembunuhan dengan alasan telah memberikan aib kepada keluarga, meskipun hal tersebut belum terbukti.

Komisi HAM Pakistan serta LSM-LSM tak henti-hentinya memperjuangkan hak-hak perempuan, masyarakat yang tumbuh di Pakistan hingga saat ini sepertinya terbentuk berdasarkan asumsi pemikiran yang diskriminatif terhadap perempuan (*deep-rooted gender bias*). Di dalam *male dominated country* seperti Pakistan, kaum wanita hanya ditempatkan sebagai alat produksi keturunan, properti, komoditi dan lambang kehormatan pria. Orang tua atau keluarga mengatur jodoh bagi anak-anaknya (*arranged marriage*) biasanya dengan sanak-saudara terdekat sehingga harta keluarga besar tidak pindah ke tangan keluarga lain. Anak gadis atau anggota keluarga wanita tidak jarang dipaksa menikah sebagai bagian dalam upaya menyelesaikan pertikaian di antara anggota keluarga/kelompok atau antar suku maupun kelompok. Tidak heran jika pekerjaan-pekerjaan pelayanan publik seperti di

pasar, toko, restoran, hotel dan tempat rekreasi di Islamabad dan kota-kota Pakistan lain, hanya dilakukan oleh kaum pria.

Ketika dibawah rezim perdana menteri Jendral Mohammad Zia ul-Haq, juga telah menerapkan hukum Islam yang mengurangi nilai kesaksian kaum perempuan di pengadilan menjadi hanya setengah dari nilai kesaksian kaum laki-laki. Sehingga pada masa itu, penjara-penjara di Pakistan banyak dipenuhi oleh kasus-kasus perempuan, misalnya kasus anak perempuan berusia tiga belas tahun yang diperkosa dan hamil tetapi dimasukkan ke penjara karena tuduhan perzinaan sebab tidak dapat mendatangkan empat saksi laki-laki untuk membuktikan kejahatan tersebut. Kaum perempuan bahkan tidak bisa membuka rekening bank tanpa seizin kaum laki-laki (Yousafzai dan Lamb, 2014: 39).

Selain itu, ketimpangan gender di Pakistan juga diperkuat karena adanya tradisi turun menurun (praktik budaya kuno) yang merenggut hak dan status kehidupan perempuan di Pakistan. Hal ini biasanya dikarenakan kaum perempuan harus menjaga martabat keluarga dan agama. Ada beberapa macam adat dan tradisi yang merenggut status kehidupan perempuan di Pakistan seperti *Swara* dan *Vani*, *Watta Satta*, dan *Karo Kari*.

*Swara* adalah tradisi suku Pashtun di Peshawar, Swat yang menyatakan seorang anak perempuan boleh diserahkan kepada suku lain untuk menyelesaikan konflik atau permusuhan. Pengantin swara diserahkan kepada keluarga yang anggotanya terbunuh oleh salah seorang anggota laki-laki di keluarganya. Sedangkan *Vani* adalah tradisi di Punjab, Pakistan dimana wanita diserahkan sebagai kompensasi

atas kesalahan yang dilakukan oleh laki-laki dari anggota keluarganya. Pada dasarnya, tradisi ini sama-sama mengorbankan perempuan sebagai bayaran atas kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarganya, tidak peduli perempuan itu masih anak-anak maupun remaja.

*Watta Satta* adalah tradisi dimana seorang anak perempuan dinikahkan dengan saudara dari kakak iparnya. Dan *Karo kari* adalah sebuah tradisi dalam bahasa Urdu yang berarti Karo (pria pendosa) dan kari (wanita ternoda). Karo kari dikaitkan dengan keterlibatan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum atau di luar pernikahan. Apabila seorang perempuan berbuat *kari* atau melakukan hubungan asmara dengan laki-laki yang bukan suaminya, maka perempuan tersebut dianggap sebagai aib atau noda bagi keluarganya dan harus dihukum atau bahkan dibunuh oleh ayah, saudara laki-laki, atau suaminya yang dapat dilakukan sendiri atau dengan menyewa orang lain. Akan tetapi, pengertian "aib" atau "noda" ini kemudian diperluas menjadi perbuatan yang tidak bermoral, seperti menolak menikah dengan calon yang dipilih oleh orang tua dan justru menikah dengan pilihan sendiri, meminta cerai kepada suami, berselingkuh, berpindah agama atau kepercayaan, mengadopsi budaya asing di luar budaya suku/etnis atau kelompoknya, berpakaian tidak sopan, dan berperilaku menyimpang (Hankam, Kompasiana, 17 Juli 2012).

Dalam surat kabar online Voice of America (VOA) menuliskan bahwa menurut kelompok HAM perempuan di Pakistan, kekerasan terhadap kaum perempuan di negara itu naik dalam setahun belakangan. Ribuan perempuan diculik, dibunuh dan diperkosa setiap tahun. Masalah infrastruktur dan sistem peradilan yang tidak efektif

di Pakistan, bersama praktik budaya kuno, menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditangani dengan baik. Dalam tahun-tahun belakangan Pemerintah Pakistan telah melembagakan peraturan yang melindungi hak-hak perempuan. Namun, tidak ada hukum yang mengatur kekerasan rumah tangga dan hukum atas pembunuhan terhormat serta bentuk-bentuk lain kekerasan gender kurang diberlakukan secara tegas. Sehingga kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan semakin menjadi dan meluas ke aspek-aspek lainnya (VOA, Berita Utama, 26 Oktober 2012).

## **II. Pendidikan Perempuan di Pakistan sebelum Taliban**

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pendidikan adalah upaya untuk memperkuat kualitas keberlangsungan hidup manusia, dengan pendidikan orang-orang dapat lebih maju dan berkembang dalam rangka pencapaian pola pemikiran yang sempurna. Ketentuan gratis dan wajib sekolah dasar untuk setiap orang telah dideklarasikan sebagai hak fundamental bagi setiap orang. *Universal Declaration of Human Right*, telah disetujui oleh negara-negara di dunia pada *UN General Assembly* tahun 1948 yang menyatakan bahwa : "*Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. . . .*" (PILDAT, *Enforcement Article*, No. 25-A, 2011: 07).

Pendidikan telah menjadi bagian penting untuk perkembangan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dimulai tidak hanya dari pengetahuan, informasi dan

kesadaran individu, tetapi juga sebuah strategi keseluruhan untuk perkembangan dan perubahan. Pendidikan adalah sebuah masukan kritis dalam perkembangan sumber daya manusia dan merupakan esensial bagi pertumbuhan ekonomi negara. Pengakuan terhadap fakta ini telah menciptakan kesadaran tentang perlunya fokus pada program pendidikan sekolah dasar dan tingkat melek huruf, tidak hanya sebagai masalah keadilan sosial tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan stabilitas sosial.

Dalam status pendidikan, di Pakistan sulit untuk membawa anak-anak terutama perempuan ke sekolah. Tingkat partisipasi yang rendah dan pertumbuhan populasi yang tinggi menyebabkan peningkatan yang stabil di luar dari jumlah anak-anak yang bersekolah dan jumlah angka buta huruf di negaranya meningkat secara bertahap dari 20 juta selama 1951 sampai 50 juta pada 1998. Hal ini diperkirakan bahwa sekitar 55 juta warga Pakistan berumur 10 tahun ke atas tidak bisa membaca dan menulis, dan sekitar 7 juta anak-anak berumur 5 sampai 9 tahun keluar dari sekolah. Di daerah perkotaan, sekitar 52% anak-anak perempuan tidak terdaftar di sekolah dan 67% perempuan buta huruf. Rendahnya indikator-indikator pendidikan dalam masyarakat Pakistan secara negatif mempengaruhi segala bidang kehidupan dan proses perkembangan, termasuk pertumbuhan ekonomi, evolusi sosial dan stabilitas politik (PILDAT, *Enforcement Article*, No. 25-A, 2011: 07).

Tingginya tingkat buta huruf adalah hambatan besar untuk kemajuan perempuan. Terdapat kesenjangan pada perbedaan tingkat pendidikan, dengan kesenjangan gender meningkat. Adanya sebuah ketidaksetaraan *gender* yang

meningkat pada beberapa level tertentu menjadikan seorang wanita memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan daripada seorang pria.

Kondisi kemiskinan pada sekolah-sekolah umum di Pakistan mempunyai dampak negatif terhadap angka partisipasi secara keseluruhan. Hal terburuk yang menimpa perempuan-perempuan di daerah pedesaan adalah hilangnya hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan. Banyak sekolah-sekolah di Pakistan menderita karena kekurangan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi mereka secara maksimal. Banyak sekolah yang tidak memiliki dinding dan kekurangan air serta tidak memiliki fasilitas toilet. Faktor-faktor tersebut menjadi dampak yang sangat besar pada partisipasi pendidikan terutama bagi anak-anak perempuan. Alokasi untuk pendidikan juga harus ditambah. Sayangnya isu ini secara keseluruhan terkait pada kinerja ekonomi negara dan situasi daerah. Namun kebijakan-kebijakan pendidikan menggenggam janji sebuah kemajuan dalam situasi ini (SDPI, *Pakistan: Country Gender Profile, 2007-2008*: 08).

Gambaran kondisi dari pendidikan sangat muram di Pakistan. Lebih dari 40 persen anak perempuan di Pakistan tidak pernah mendaftar sekolah. Situasi seperti ini sering kali terjadi di daerah pedesaan dikarenakan kendala sosial dan budaya. Jumlah kehadiran anak-anak perempuan di sekolah dasar dan sekolah menengah lebih sedikit dari anak laki-laki. Hal ini bisa dikarenakan kesalahan dalam menafsirkan pendidikan menurut Islam yang mendominasi agama di Pakistan. Pada dasarnya Islam mengajak kaum laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan, hanya saja masih banyak masyarakat di Pakistan yang memiliki pemikiran kuno berlandaskan budaya

turun temurun dimana pendidikan hanya untuk kaum laki-laki. Sehingga banyak anak perempuan di Pakistan yang buta aksara dan menjadi salah satu hambatan bagi kemajuan kaum perempuan di sana.

Kemiskinan juga merupakan penyebab utama kesenjangan gender dalam pendidikan. Kemiskinan di Pakistan sangat berhubungan dengan buruh anak. Salah satu alasan yang paling umum mengapa anak-anak tidak bersekolah adalah karena keluarga mereka membutuhkan tenaga mereka untuk bekerja. Hak anak-anak juga dilanggar ketika mereka dipaksa menyumbang pendapatan keluarga. Ada aktifitas-aktifitas yang berbeda antar anak laki-laki dan perempuan dalam menyumbang pendapatan keluarga. Anak perempuan di Pakistan umumnya bekerja di bidang yang berhubungan dengan pertanian, membawa makanan ke ladang dan menjaga adik-adik mereka, jika sang ibu juga sibuk bertani. Anak laki-laki sering ikut menjual makanan, bekerja di bengkel dan pembuatan karpet. Dan ketika keluarga miskin merasa terpaksa memilih untuk mendidik anak laki-laki atau perempuan maka mereka lebih memilih untuk mendidik anak laki-laki karena mendidik anak perempuan dianggap sebagai suatu pemborosan. Anak laki-laki sering dipandang sebagai investasi yang lebih baik karena nantinya akan menopang keluarga, sedangkan anak perempuan mungkin akan segera dinikahkan agar dapat membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu, bias budaya sering kali membuat anak perempuan tidak bisa mengakses salah satu hak mereka yang paling mendasar.

Selain itu, sedikitnya sekolah khusus anak-anak perempuan dan kurangnya fasilitas di sekolah khusus perempuan menjadi faktor lain yang menyebabkan jumlah

anak perempuan yang bersekolah sangat sedikit. Di Pakistan, juga masih ada tradisi bahwa anak perempuan harus diajar oleh guru perempuan. Sedangkan, jumlah guru perempuan di Pakistan sangatlah sedikit bahkan dapat dikatakan hanya separuh dari jumlah guru laki-laki di Pakistan. Selain itu didukung pula oleh rendahnya tingkat melek huruf dikalangan perempuan dewasa.

### **III. Pendidikan Perempuan di Pakistan Era Taliban**

Taliban adalah sebuah kelompok militan dan politik Islam yang berasal dari Afghanistan. Taliban muncul pertama kali pada tahun 1994, dalam perkembangannya berhasil tumbuh menjadi kelompok paling berkuasa di Afghanistan sebelum akhirnya dilengserkan paksa oleh pasukan koalisi pimpinan AS pada tahun 2001 setelah serangan terorisme terhadap gedung *World Trade Centre* (WTC) di New York pada 11 September 2001 (BBC Indonesia, 2009). Nama Taliban berasal dari bahasa Pashto yaitu "*talib*" yang berarti pelajar, dan para pendiri Taliban pada awalnya memang merupakan pelajar dari madrasah di Afghanistan dan Pakistan (www.re-tawon.com, 2012).

#### **A. Kemunculan Taliban di Pakistan**

Pasca gempa bumi pada Oktober 2005 yang menimpa sebagian besar Pakistan, Taliban muncul sebagai sebuah organisasi bernama *Tehrik-e-Nifaz-e-Sharia-e-Mohammadi* (TNSM) atau Gerakan untuk Penerapan Hukum Islam. Sebuah kelompok organisasi yang dibentuk oleh Sufi Muhammad, yang mengirim orang-orang Pakistan untuk bertempur di Afghanistan melawan koalisi Amerika. Sufi

Muhammad berada di penjara sejak tahun 2002, ketika presiden Musharraf menangkap sejumlah militan setelah didesak oleh Amerika, tetapi organisasinya masih berlanjut dan dijalankan oleh menantu laki-lakinya bernama Maulana Fazlullah. TNSM muncul sebagai relawan yang membantu pemulihan pasca gempa dahsyat yang mengguncang Pakistan (Yousafzai dan Lamb, 2014: 124).

Maulana Fazlullah muncul di Imam Deri, sebuah desa kecil di Lembah Swat bagian utara Pakistan. Ia membangun stasiun radio ilegal yang diberi nama Mullah FM. Stasiun itu melakukan siaran setiap malam mulai pukul delapan sampai dengan sepuluh malam, dan pada pagi hari pukul tujuh sampai setengah sembilan.

Maulana Fazlullah memperkenalkan dirinya sebagai pembaru Islam dan penafsir Al-Quran. Dia menggunakan stasiun radio ilegalnya untuk mendorong orang-orang agar menjalankan kebiasaan baik dan meninggalkan yang buruk menurut tafsirnya. Kaum laki-laki diharuskan memelihara janggut. Lalu memperingatkan orang-orang untuk berhenti mendengarkan music, menonton film dan menari, karena menurutnya perbuatan tersebut tidak ada didalam Islam dan dapat mendatangkan segala bencana.

Penduduk setempat menganggap bahwa Fazlullah merupakan sosok laki-laki berkarisma dan memang penafsir Al-Quran yang baik. Mereka setuju terhadap penerapan kembali hukum Islam yang dibicarakan oleh Fazlullah sebab mereka merasa tidak puas dengan sistem peradilan Pakistan yang menggantikan sistem peradilan Swat sejak bergabung dengan Pakistan.

Dalam jangka waktu enam bulan, Fazlullah berhasil menyingkirkan televisi dan DVD. Ratusan toko CD dan DVD ditutup secara sukarelawan dan para pemilik mendapat kompensasi dari Taliban. Tidak hanya musik dan televisi, Taliban juga menghancurkan patung-patung Buddha bersejarah di Pakistan seperti yang pernah mereka lakukan di Bamiyan, Afghanistan. Taliban menghancurkan patung-patung dan stupa-stupa Buddha yang merupakan peninggalan sejarah yang telah ada selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari sejarah Swat sejak masa raja-raja Kushan (Yousafzai dan Lamb, 2014: 145-146). Mereka juga meledakkan wajah Buddha Jehanabad yang menjulang tujuh meter ke langit yang terdapat di lereng bukit Mingora.

Taliban menjadi musuh bagi sejarah, kebudayaan dan seni rupa. Mereka menganggap semua yang berbau Barat harus dimusnahkan. Taliban juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengharuskan kaum perempuan berada di rumah dan tidak diperkenankan berkeliaran tanpa didampingi oleh suami atau saudara laki-laki mereka. Selain itu, Taliban juga melarang anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Bagi siapapun yang melanggar kebijakan mereka, maka Taliban tidak segan-segan memberikan hukuman mulai dari hukum cambuk hingga ditembak mati didepan orang-orang.

#### **B. Taliban dan Pendidikan Perempuan di Pakistan**

Taliban memandang bahwa pendidikan yang diberikan di Pakistan adalah pendidikan yang berbudaya barat, dan Islam menurut persepsi mereka melarang hal tersebut. Taliban mengancam sekolah untuk anak-anak perempuan dengan alasan anak

perempuan seharusnya disimpan dan disembunyikan di balik purdah dan mulai mengancam anak-anak yang pergi ke sekolah.

Oleh sebab itu, anak-anak perempuan yang pergi ke sekolah selalu dibayangi ketakutan apabila kelompok Taliban datang dan menodongkan senjata atau menyiramkan cairan kimia ke wajah mereka. Taliban terus mempropagandakan isu bahwa anak perempuan seharusnya berada di rumah dan tidak diperkenankan untuk berangkat ke sekolah. Ancaman demi ancaman didatangkan oleh Taliban kepada perempuan yang berangkat ke sekolah baik sebagai pelajar ataupun pengajar. Taliban mengancam akan menembak atau menghukum mati bagi perempuan yang melanggar aturannya.

Sebagian anak-anak perempuan yang ketakutan memilih untuk berhenti sekolah sesuai perintah Taliban. Nama mereka disebutkan satu per satu di Mullah Radio disertai dengan ucapan selamat dan puji-pujian lainnya. Sedangkan anak-anak perempuan lain yang takut tetapi masih ingin terus sekolah, memilih untuk meninggalkan daerahnya dan mengungsi serta bersekolah di daerah yang bebas dari ancaman Taliban.

Pada akhir Oktober 2008, Taliban melalui siaran radionya Mullah FM menyatakan bahwa mulai 15 Januari 2009 anak perempuan dilarang pergi ke sekolah. Taliban menginginkan Negara menjalankan hukum syariah (menurut tafsir mereka) dimana perempuan dilarang mendapatkan pendidikan karena dianggap tidak Islamiah. Satu persatu sekolah perempuan di Pakistan terutama di Lembah Swat diledakkan oleh Taliban (Malala Yousafzai 2014).

Sekolah-sekolah yang tetap menyekolahkan anak-anak perempuan mulai diledakkan dengan bom. Sekolah pertama yang diledakkan ialah Shawat Zangai, SD negeri untuk anak perempuan di Matta. Kemudian disusul sekolah-sekolah lainnya di Lembah Swat, termasuk di Mingora, kota tempat tinggal Malala

Pada 7 Oktober 2008, sekolah perempuan Sangota Convent School dan sekolah anak lelaki Excelsior College diledakkan sampai rata dengan tanah. Semua murid dan gurunya sudah dievakuasi karena mendapat ancaman. Excelsior punya lebih dari 2000 murid dan Dangota punya 1000 murid (Kompasiana, 2014).

Data tahun 2008 sampai dengan 2009, mencatat bahwa Taliban telah menghancurkan lebih dari 400 gedung sekolah di Lembah Swat, Pakistan. Kemudian pada bulan Maret 2011, dua gedung sekolah dasar pemerintah khusus perempuan di desa Khyber, Pakistan berbatasan dengan Afghanistan diledakkan dengan dinamit oleh sekelompok orang. Taliban menyatakan diri sebagai penanggung jawab dari ledakkan tersebut (Kompasiana, 2011).

Penghancuran sekolah-sekolah perempuan yang dilakukan oleh Taliban merupakan salah satu bentuk perlawanan Taliban terhadap pemerintah Pakistan yang dianggap tidak menjalankan hukum Islam dengan benar. Taliban memiliki tujuan untuk merebut Pakistan dan menjadikan Pakistan sebagai negara dengan Islam garis keras. Maka selama pemerintahan Pakistan membiarkan hal-hal yang tidak berbau Islam berkeliaran secara bebas, Taliban akan menghancurkannya dengan segera termasuk sekolah-sekolah perempuan karena menurut mereka anak-anak yang membaca buku, belajar bahasa Inggris atau mempelajari sains akan menjadi ke barat-

barat-an dan hal tersebut dianggap tidak sesuai hukum Islam menurut tafsir mereka  
(Yousafzai dan Lamb, 2014: 190-191).